

BAB I

PENDAHULUAN

Hubungan Bilateral adalah hubungan antar dua negara, Hubungan Bilateral biasanya mencakup beberapa hal seperti perjanjian politik, kerjasama ekonomi, pertukaran duta besar dan kunjungan atau pimpinan pemerintah negara. Hubungan Bilateral sangat dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Saling mengisi kekurangan yang dimiliki negara masing-masing, dimana tentunya melakukan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Dari hubungan bilateral tersebut diharapkan bisa menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat masing-masing. Hubungan yang baik akan memberikan dampak positif, dan akan menentukan kesuksesan sebuah kerjasama. Sementara hubungan negara yang buruk nantinya akan merugikan dan membuat konflik-konflik eksternal dan perpecahan. (Larasati, 2016)

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia banyak menjalin hubungan bilateral, terhitung sejak memproklamasikan Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. (Kemlu.go.id) Salah satunya adalah Hubungan Bilateral Indonesia dengan Brasil. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Brasil cukup kuat. Hal ini dikarenakan kedua negara memiliki banyak kesamaan. Selain sebagai sesama negara demokrasi, Indonesia dan Brasil sama-sama negara yang memiliki keberagaman etnis, selain itu kedua negara tersebut adalah negara dengan hujan tropis terbesar di Dunia.

Hubungan diplomatic antara Indonesia dan Brasil memang sudah terjalin sejak lama, terhitung sejak tahun 1953 dengan adanya penempatan diplomat di masing-masing negara. Hubungan tersebut juga dibuktikan dengan

adanya berbagai kunjungan Presiden. Pada tanggal 28-29 September 2000 Presiden Indonesia pada saat itu, Abdurrahman Wahid mengadakan kunjungan ke negara Brazil, kemudian disusul kunjungan Presiden Brasil, Fernando Henrique Cardoso, pada tanggal 20-23 January 2001, dan kunjungan Presidential Luiz Inácio Lula da Silva, yang dilakukan pada tanggal 11-12 July 2008. (Kemlu RI, n.d.)

Selain itu, berbagai kerjasama telah dilakukan oleh kedua negara dalam berbagai bidang. Termasuk, pelestarian hutan hujan kedua negara yang memiliki geografis yang sama, dengan adanya hujan tropis terbesar di dunia. Hal tersebut menjadi tugas masing masing dalam berperan menjaga ekosistem melalui perawatan dan penjagaan lingkungan khususnya hutan. Selain itu juga kerjasama di bidang ekonomi telah terjalin dalam perdagangan tembakau, Indonesia telah mendirikan salah satu cabang pabrik rokok di Brazil. Hal tersebut semakin menunjukkan kuatnya hubungan bilateral yang terjalin dari kedua negara tersebut.(Christie, Sisi, & Denny, 2015)

Namun, pada Tahun 2015 Indonesia – Brasil mengalami ketegangan dalam hubungan diplomatik. Hal tersebut dikarenakan kasus eksekusi terhadap Marco Archer Cardoso Moreira terdakwa penyelundupan 13,4 kilogram kokain saat hendak masuk ke Indonesia dan disembunyikan di dalam peralatan olahraga miliknya. Moreira ditangkap di Bandara Cengkareng pada tahun 2003 oleh pihak kepolisian bandara internasional Soekarno Hatta, Jakarta. Moreira kemudian dieksekusi beserta dengan narapidana narkoba lainnya secara serentak. Empat warga negara asing yang berasal dari Brasil, Belanda, Malawi, Nigeria dan satu terdakwa asal Indonesia telah di eksekusi pada 18 Januari 2015 dini hari di LP Nusa Kambangan. (BBC Indonesia, 2015)

Pada kenyataannya, kasus perdagangan ilegal tersebut sangat bertolak belakang dalam upaya menjaga hubungan bilateral yang baik antar dua negara, karena bersinggungan dengan peraturan dan kebijakan yang telah dianut oleh masing-masing negara. Termasuk *output* dari hukuman eksekusi

kejahatan perdagangan narkoba. Eksekusi mati terpidana narkoba tersebut sangat berdampak bagi hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Brasil.

Pada kasus tersebut terdapat faktor yang menjadi penghambat ketika di dalam kerjasama yang dijalin oleh kedua negar yaitu vonis hukuman mati. Penangkapan Moreira membawa terdakwa kejahatan narkoba lintas batas tersebut kepada vonis hukuman mati. Moreira menjalani hukuman pada tahun 2015. Vonis tersebut menjadi sebuah kemunduran dan hambatan bagi Indonesia untuk bekerjasama lebih lanjut dengan negara Brasil merasa penanganan terpidana narkoba yang dilakukan oleh Indonesia tidak sesuai dengan norma internasional yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).

Disisi lain, pemerintah tetap kuat dalam menjalankan peraturan dengan menghukum mati narapidana asing yang menyelundupkan narkoba ke negara Indonesia. Peredaran narkoba di Indonesia berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Maraknya peredaran ini sudah merambah ke remaja-remaja yang menjadi penerus generasi bangsa. Bukan hanya target sasaran yang meluas, tetapi status Indonesia pun kini sudah menjadi sasaran peredaran narkoba internasional. Indonesia menjadi target sasaran internasional dikarenakan Indonesia mempunyai pangsa pasar yang banyak dan harga jualnya yang mahal. (Sardjono, 1996)

Dampak yang terjadi sangat terasa pada Tahun 2015 dalam hubungan Indonesia – Brasil mengalami ketegangan dalam hubungan diplomatik atas eksekusi narapidana dari Brasil. Reaksi keras ditunjukkan oleh Presiden Brasil, Dilma Rousseff. Melalui juru bicaranya, dia mengaku 'terkejut' dan 'marah' atas sikap Indonesia yang menolak segala upayanya menyelamatkan Marco. Dan juga melalui sambungan telepon langsung antara Dilma dan Presiden Jokowi. "Menjalankan hukuman mati yang sudah ditolak komunitas internasional mempengaruhi hubungan kedua negara," kata Dilma. (Mohamad, 2015)

Kasus eksekusi mati narapidana narkoba dari Brasil tersebut berbuntut panjang, dan menemui berbagai pro kontra tidak hanya dari kedua negara, publik internasional juga ikut merespon atas eksekusi yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut. Bahkan salah satu jurnal kesehatan tertua di dunia yang berbasis di Inggris, *The Lancet*, menerbitkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Isi surat itu meminta sang Presiden untuk menghentikan strategi perang melawan narkoba yang menggunakan cara rehabilitasi paksa dan hukuman mati. (Sasongko, 2015)

Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk memberantas perdagangan narkoba. Meskipun mendapat protes dari berbagai negara, termasuk sejumlah lembaga internasional, komitmen untuk tetap melakukan eksekusi hukuman mati untuk narapidana narkoba tetap dilakukan. Bahkan, Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan pengampunan atau grasi untuk para narapidana pengedar narkoba. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima kunjungan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, di Istana Merdeka. (Wisnoe, 2016)

Presiden Joko Widodo bertekad untuk tidak lagi membiarkan narkoba merusak generasi muda bangsa Indonesia. Beliau mendesak aparat keamanan, agar selalu bertindak tegas terhadap kejahatan luar biasa ini. “Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, kejar mereka! Tangkap mereka! Hantam mereka!”(Rinakit, 2016)

Presiden Jokowi juga menginstruksikan BNN beserta pihak kepolisian untuk bertindak tegas *Drug Trafficking*, para Bandar Narkoba berkewarganegaraan asing, karena dinilai tidak menghormati peraturan yang ditetapkan di Indonesia, selain itu saat ini Indonesia telah memasuki tahap Darurat Narkoba di Indonesia. Hal tersebut disusul dengan respon tindakan dari Pemerintah Brasil Pada tanggal 19 Februari 2015, Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto mendapat undangan diplomatik dari

Departemen Luar Negeri Brasil untuk mengikuti penyerahan surat kepercayaan bersama lima Duta Besar negara lainnya.

Ketika memenuhi undangan tersebut, Menteri Luar Negeri Brasil justru mengatakan bahwa upacara penyerahan surat kepercayaan dari Indonesia ditunda. Duta Besar Toto Riyanto diberi informasi secara mendadak bahwa Brasil menunda surat kepercayaan dari Indonesia. Yang berarti tidak akan ada perwakilan dari negara Indonesia dalam acara resmi di Brasil. Penolakan tersebut merupakan buntut dari hukuman mati yang dilakukan terhadap Moreira. (BBC Indonesia, 2015)

Akibat penundaan terhadap kredensial Indonesia untuk Brazil yang dilakukan sebagai salah satu cara Brazil memprotes pemerintahan Indonesia, yang tetap menghukum mati warga negaranya yang terbukti melakukan peredaran narkoba. Indonesia tidak mau dipermainkan begitu saja. Presiden Joko Widodo dengan cepat menarik Duta Besar Indonesia di Brazil, Toto Riyanto, sebagai bentuk penegasan Indonesia bahwa negara lain harus menghormati prosedur hukum di Indonesia, terkait reaksi negara-negara asal terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi. (Aspasia, 2015)

Tidak berhenti disitu saja, dampak eksekusi tersebut juga berpengaruh pada hubungan bilateral antara Brasil dan Indonesia. Dalam bidang perdagangan transaksi dagang yang ada kaitannya dengan jual beli daging sapi yang diekspor dari Brasil dan rencana jual beli pesawat super Tucano dari Brasil bahkan ditunda sampai ada pembahasan dan penyelesaian lebih lanjut terkait hubungan diplomatik Indonesia Brasil. (Tempo, 2015) Hal tersebut tentu menjadi polemik permasalahan yang besar bagi hubungan bilateral kedua negara tersebut, mengingat kedua negara memiliki hubungan dan kerjasama yang terjalin lama dan erat sebelum kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: **Mengapa Brasil melakukan penolakan terhadap Diplomat Indonesia untuk Brasil, pasca eksekusi mati narapidana narkoba Brasil oleh pemerintah Indonesia?**

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Konstruktivis

Teori Konstruktivis (atau Konstruktivisme social) adalah suatu teori yang muncul sebagai kritik bagi dua teori terkemuka yaitu Liberalisme dan Realisme, yang berusaha menjelaskan tindakan para aktor didalam sistem internasional. Konstruktivisme hadir berusaha untuk memaparkan pandangan lain dalam memahami sistem internasional. Teori ini berfokus kepada kesadaran manusia dan bagaimana mengimplementasikan di system Internasional. Konstruktivis diinspirasi oleh perkembangan teoretis dalam disiplin ilmu pengetahuan social lain termasuk filsafat dan sosiologi. Dalam pandangan sosiologi, Anthony Giddens (1984) mengungkapkan konsep strukturasi sebagai cara menganalisis hubungan antara struktur dan actor. (Pengantar Studi Hubungan Internasional, Robert Jackson & George Sorensen; hal 370)

Konstruktivisme diperkenalkan ke Hubungan Internasional oleh Nicholas Onuf (1989). Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional menawarkan untuk menghubungkan antara neoliberalisme dengan neorealisme melalui pemahaman bahwa tidak ada logika internasional yang anarki. Konstruktivisme lahir untuk menawarkan jalan ketiga dengan memadukan unsure-unsur moderat dari kedua kubu ekstrim tersebut. Teori Konstruktivisme berfokus pada tiga konsep utama yaitu; Norma, Identitas dan Kepentingan.

Teori Konstruktivisme social menganggap bahwa hubungan antara struktur dan agen bersifat *mutually constitutive*, atau saling memengaruhi satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Struktur member pengaruh dan batasan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh agen. Konstruktivisme menjelaskan bagaimana pembentukan identitas dan norma domestik saling berpengaruh.

“Fakta bahwa kita hidup dalam masyarakat internasional berarti bahwa apa yang kita inginkan dan dengan cara tertentu, siapa kita, yang dibentuk oleh norma-norma social, peraturan, pemahaman, dan hubungan yang kita miliki dengan yang lain. Realitas social ini sama pengaruhnya dengan realitas material dalam menentukan perilaku” (Finnemore 1996; hal 28).

Konstruktivisme menggunakan norma sebagai sarana dalam memperbaiki keadaan atau melakukan perubahan-perubahan social. Konstruktivism yang berkonsep pada ide, norma, konstruksi social, identitas actor dan kepentingan actor. Karenanya Konstruktivisme menangkak focus hanya kepada materi saja, menurut mereka aspek yang paling penting dari hubungan internasional adalah social, bukan material.

“Pendekatan konstruktivis memperluas repertoar penjelasan teoritis dengan menyatakan bahwa negara berperilaku sesuai dengan "logika kesesuaian" dan "logika konsekuensi material" untuk tindakan mereka. Namun, dengan mengklaim standar kesesuaian itu – i.e. “norms” – determine political outcomes (Finemore, 1996).

Dalam Konstruktivisme norma adalah hasil dari tindakan suatu negara dan juga dapat mempengaruhi tindakan sebuah negara. Dengan hal tersebut Konstruktivisme sangat melekat dan relevan pada HAM. HAM yang berlaku diberbagai negara di dunia saling berinteraksi dan berkesinambungan dengan kultur atau norma-norma di masing-masing negara. Kepentingan suatu negara juga dapat dibentuk dari ide-ide dan norma-norma. HAM mengikat kuat karena merupakan norma yang bersifat

universal sehingga dapat menjadi dasar tindakan suatu Negara dalam bertindak dan memutuskan sesuatu.

Setelah menelaah melalui pandangan teori Konstruktivisme, dapat diimplemetasikan dalam permasalahan diatas mengenai kebijakan Brasil melakukan penolakan terhadap diplomat Indonesia untuk Brasil. Pemerintah Brasil menganggap eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap narapidana warga negara Brasil merupakan tindakan yang salah dan tidak sesuai HAM yang berlaku di negaranya. Sebagai negara demokrasi, Brasil telah sangat lama meninggalkan hukuman mati di negara nya, sehingga norma-norma yang terbentuk di masyarakat pun adalah eksekusi hukuman mati merupakan pelanggaran HAM. Hal tersebut yang akhirnya mendorong Brasil dengan berbagai upaya untuk mencegah dan mencegah eksekusi mati tersebut.

D. Hipotesa

Melihat kasus penolakan diplomat Indonesia untuk Brasil dari kacamata konstruktivisme, yang menjelaskan adanya pengaruh satu sama lain hubungan antara struktur dan agen bersifat *mutually constitutive*, atau saling memengaruhi satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Adanya tekanan berupa opini public dari kelompok kepentingan kepada pemerintah Brasil. Tuntutan tersebut muncul dari dorongan dari masyarakat Brasil agar pemerintah Brasil merespon dengan tegas eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia tersebut. Sistem pemerintahan Brasil yang menganut Demokrasi Liberalis secara ideologis, mendorong Brasil untuk menolak hukuman mati.

E. Metode Penelitian

1. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, analisis menggunakan Kualitatif Deskriptif menggambarkan situassi yang relevan dan dipandang secara Obyektif jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi dan kemudian diambil kesimpulan atas fakta-fakta tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi pustaka (library research), yang datanya didapatkan melalui sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal, majalah, artikel, surat kabar, laporan penelitian, dan melalui jejaring internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisa.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyebab terjadinya permasalahan hubungan Bilateral yang terjadi antara Indonesia dengan Brasil yang berbuntut pada penolakan terhadap Diplomat Brasil untuk Indonesia.
2. Menjelaskan penyebab penolakan pemerintah Brasil terhadap eksekusi yang dilakukan pemerintah Indonesia yang dianggap menyalahi HAM dan norma kemanusiaan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoritis yang digunakan, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Memberi gambaran mengenai hubungan Indonesia dan Brazil secara umum, di berbagai bidang, terutama sebelum tahun 2015.

Bab III: Memperlihatkan bagaimana komitmen Indonesia sebagai sebuah negara besar, dalam menanggulangi kejahatan Narkoba.

Bab IV: Mengulas alasan Brasil menolak hukuman mati yang dilakukan oleh Indonesia, terkait norma dan HAM yang diterapkan melalui landasan hukum di Brasil.

Bab V : Penutup dan kesimpulan skripsi.